



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang di dalamnya menggambarkan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan, laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan, Tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Demikian Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana pembangunan kedepan. Namun tetap disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah laut,

Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang - undang	1
b. Data Geografis wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	8
e. Gambaran Umum Dinas Sosial.....	9
f. Struktur Organisasi.....	9
g. Kepegawaian.....	12
h. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	13
i. Realisasi Anggaran Belanja Daerah.....	14
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	16
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	19
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	19
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintah.....	19
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	23
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	27
2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	27
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	34
3.1 Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/Provinsi ...	34
3.2 Tugas Pembantuan yang diberikan	34
BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	35
4.1 Urusan Bidang Sosial	35

4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	35
4.1.2	Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah....	36
4.1.3	Alokasi Anggaran.....	38
4.1.4	Permasalahan dan Solusi.....	40
BAB V	PENUTUP	42
	Kesimpulan	42
	Saran-Saran	44
	Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar nama PNS Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
2. Daftar rincian Pejabat Eselonering Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
3. Daftar Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang sudah mengikuti Diklat.
4. Lampiran KIB (Kartu Inventaris Barang)
5. Lampiran Pengawasan definitive per kegiatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	7
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	29
 PEMERINTAHAN DAERAH	29
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	29
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	29
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	30
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	32
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
 PEMBANTUAN	38
3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima	39
3.2 Tugas Pembantuan Yang Di Berikan.....	39
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
 MINIMAL.....	40
4.1 Bidang Urusan Sosial	40
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	40
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	41
4.1.3 Realisasi.....	45
4.1.4 Alokasi Anggaran	51
4.1.5 Dukungan Personil.....	55
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	56
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Wilayah Tanah Laut merupakan kewedanaan yang berada di dalam Daswati II Banjar yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta kekayaan alam lainnya.

Pada saat itu, Tanah Laut memiliki potensi yang cukup besar namun belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang demikian tersebut dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanaan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanaannya menjadi Daswati II.

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah

menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Utara : Kota Banjarbaru
Selatan : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
 - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
 - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
 - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
 - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
 - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan).

Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak

Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya

keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organik kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh

terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu

kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

c. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 memiliki 6 Program, 13 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.217.317.089 dengan rincian belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Belanja pegawai anggaran Rp. 4.166.000.260 terealisasi sebesar Rp. 3.365.538.103 atau 80,79 %.
2. Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 4.218.119.547 terealisasi sebesar Rp. 2.577.251.055 atau 61,10 %.
3. Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp. 4.422.690.000 terealisasi sebesar Rp. 3.393.720.000 atau 76,73 %.

Belanja Modal

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran Rp. 265.507.282 realisasi Rp. 252.780.210 atau 95,21 %.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan anggaran Rp. 125.000.000 realisasi Rp. 49.900.000 atau 39,93 %.
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran Rp. 20.000.000 terealisasi 15.935.500 atau 79,68 %.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah ***Terwujudnya Tanah Laut yang “Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.***

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Laut tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-5 (lima) yaitu : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penjabaran dari Misi 5 (lima) diatas dapat diuraikan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Membangun sinergitas antar Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Dinas Sosial kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus bersinergi dengan perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sehingga mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal atau budaya setempat.

2. Bersinergi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial juga harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

3. Bersinergi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PPKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi tentunya harus di manfaatkan dalam system Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PSKS, Sistem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan system teknologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan ***Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*** Dengan indikator :

1. Persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PPKS keseluruhan.
2. Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.

b. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan cara dan bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused - management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan Urusan Sosial diarahkan pada upaya peningkatan aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan ketahanan sosial Individu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, eks Napza, keluarga miskin, wanita rawan sosial, komunitas adat terpencil dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan jaminan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam rangka Pelaksanaan urusan wajib tentang pelayanan dasar pada Dinas sosial tentu tidak terlepas pada Program dan kegiatan dan tentunya dapat kita melihat kondisi secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar bermata pencaharian petani dan masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, lansia, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial dan kelompok rentan sosial lainnya serta meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, Orsos/LSM.

Pemberdayaan dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan/ pelatihan keterampilan berusaha agar mampu dan mandiri.

Secara umum pelaksanaan pembangunan urusan sosial telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan kerukunan serta kedamaian antar umat beragama melalui forum dialog dan kerjasama dibidang sosial dan agama.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada **4 (empat) strategi inti** yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : **pertama**, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS; **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar : **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.

c. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui Pembinaan, Penyuluhan dan Pendampingan pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat Otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial, yang berpedoman kepada kebijakan Pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya.

Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
- 2) 2 (dua) Kepala Bidang yaitu :
 - a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat

Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) sub Bagian meliputi :

 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bertugas memberikan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan.

2) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

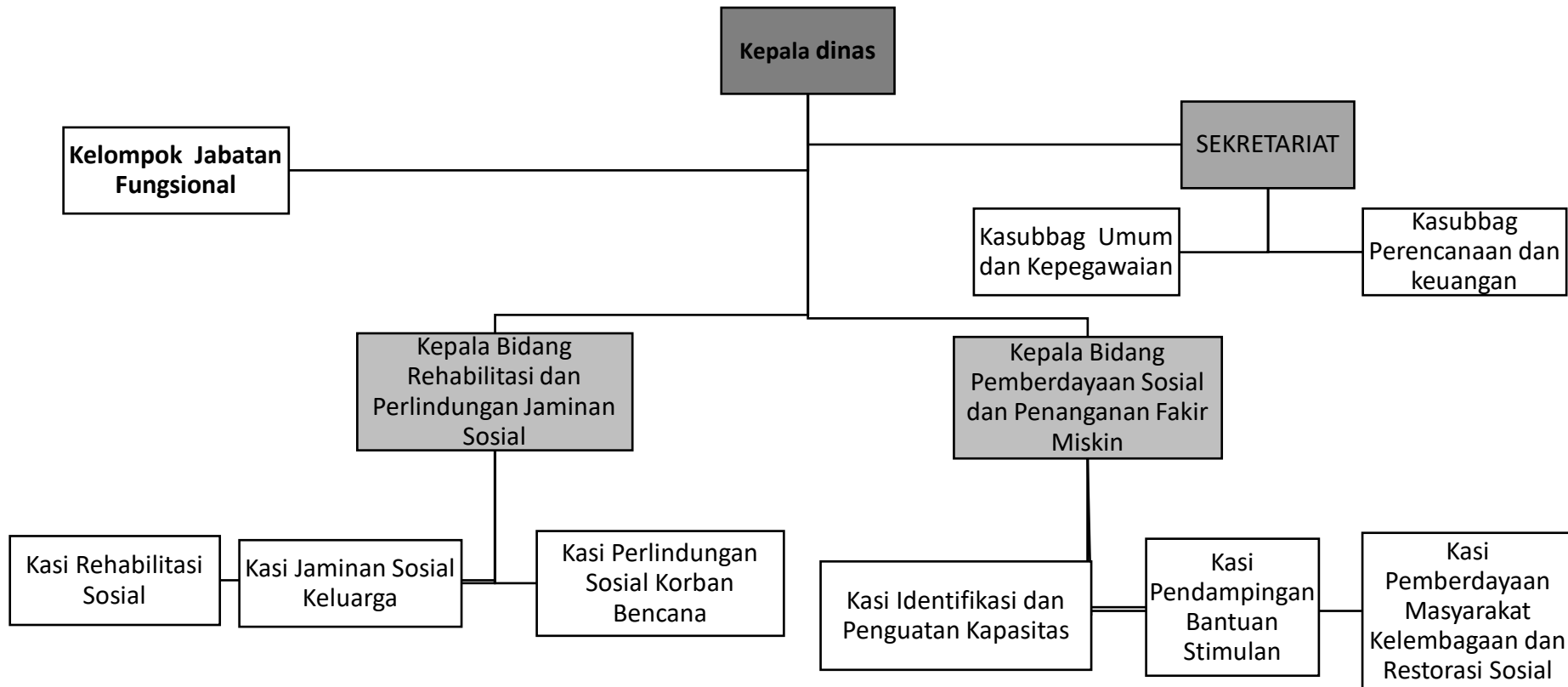
Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub seksi yaitu :

- a. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar (dibawah ini) :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**



d. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 16 (enam belas) PTT.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruan g	Kadis	Sekretariat	Bid. Pemb Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & Prhdngn JamSos	Jumlah
1	P N S	22					
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	-	-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	1	1	-	-	2
	Pembina	(IV/a)	-	1	1	1	3
	Penata Tingkat I	III/d	-	1	1	1	3
	Penata	III/c	-	-	1	-	1
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	-	3	3
	Penata Muda	III/a	-	1	2	2	5
	Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1	-	2
	Pengatur	II/c	-	-	1	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	2	-	-	2
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	Honorar Daerah	-	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	16	-	-	16

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan :

Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	P N S	
	Strata 2	4
	Strata 1	8
	Diploma III/IV	5
	SMA/Sederajat	3
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	22
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	3
	TOTAL	16

e. Kondisi Sarana dan Pra sarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2023 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Dinas Sosial.

f. Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada sasaran, dapat berikut ini :

**Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Tahun 2023**

No.	Program (sesuai Kepmendagri 050- 5889)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.817.955
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.764.802
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.406.000.260
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 7.970.847
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.359.583
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 12.175.549
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.295.870

			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 4.544.139
			Penyediaan Bahan/Material	Rp -
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 172.375.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp -
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.440.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 441.478.324
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 358.784.976
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 187.000.000

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17.700.000
2	PROGAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 110.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.855.906
3	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp 4.436.860.000
			Alat Bantu	Rp 35.707.986
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 53.043.307

			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 110.795.000
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp 10.000.000
4	PROGAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 18.750.000
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 16.590.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 406.599.833
			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 201.755.709
			Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 93.881.400
5	PROGAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1.687.489.942
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 74.919.538
6	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 47.349.426

		Kabupaten/Kota		
				Rp13.013.305.352

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2023**

No.	Program (sesuai Kepmenda gri 050- 5889)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
						Pagu	%	Pagu	%
1	PROGAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Perencanaan, Pengganga n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.817.955	Rp 17.817.731	Rp 15.918.600	89,34	Rp 1.899.131,00	10,66
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.764.802	Rp 13.764.578	Rp 12.505.865	90,86	Rp 1.258.713,00	9,14
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.406.000.260	Rp 4.166.000.260	Rp3.365.538.103,0	80,79	Rp 800.462.157,00	19,21
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Rp 7.970.847	Rp 7.900.927	Rp 5.946.600,0	75,26	Rp 1.954.327,00	24,74

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.359.583	Rp 2.359.583	Rp 2.003.644	84,92	Rp 355.939,00	15,08
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 12.175.549	Rp 69.583.049,00	Rp 66.501.695	95,57	Rp 3.081.354,00	4,43
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.295.870	Rp 3.295.870,00	Rp 2.635.525	79,96	Rp 660.345,00	20,04
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Rp 4.544.139	Rp 13.312.954,00	Rp 12.452.948	93,54	Rp 860.006,00	6,46
			Penyediaan Bahan/Material	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 9.825.000	98,25	Rp 175.000,00	1,75
			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 172.375.000	Rp. 247.375.000	Rp 246.400.708	99,61	Rp 974.292,00	0,39

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp -	Rp 21.547.697,00	Rp 19.889.940	92,31	Rp 1.657.757,00	7,69
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp 39.537.090,00	Rp 39.029.020	98,71	Rp 508.070,00	1,29
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.440.000	Rp 4.440.000,00	Rp 1.661.000	37,41	Rp 2.779.000,00	62,59
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 441.478.324	Rp 441.478.324	Rp 114.324.924	25,90	Rp 327.153.400,00	74,10
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 358.784.976	Rp. 391.401.792	Rp 389.868.876	99,61	Rp 1.532.916,00	0,39

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 187.000.000	Rp. 247.000.000	Rp 222.823.450	90,21	Rp 24.176.550,00	9,79
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17.700.000	Rp 17.700.000,00	Rp 17.622.700	99,56	Rp 77.300,00	0,44
2	PROGAM PEMBERD AYAAN SOSIAL	Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 9.740.745,00	Rp 9.700.000	99,58	Rp 40.745,00	0,42
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 110.000.000	Rp. 116.836.300	Rp 116.836.300	99,90	Rp 115.040,00	0,10

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.855.906	Rp 88.819.973,00	Rp 84.318.000	94,93	Rp 4.501.973,00	5,07
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Rp 4.436.860.000	Rp 4.436.860.000	Rp 3.405.810.000	76,76	Rp1.031.050.000,00	23,24
			Alat Bantu	Rp 35.707.986	Rp 35.707.986	Rp -	0,00	Rp 35.707.986,00	100,00
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 53.043.307	Rp 53.043.307	Rp 51.712.000	97,49	Rp 1.331.307,00	2,51

			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 110.795.000	Rp 66.795.000	Rp 50.350.000	75,38	Rp 16.445.000,00	24,62
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	80,00	Rp 2.000.000,00	20,00
4	PROGAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000	Rp 17.350.000	92,53	Rp 1.400.000,00	7,47
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 16.590.000	Rp 16.590.000	Rp 3.810.000	22,97	Rp 12.780.000,00	77,03
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 406.599.833	Rp 444.149.833	Rp 438.227.400	98,67	Rp 5.922.433,00	1,33
			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 201.755.709	Rp 201.755.709	Rp 177.161.590	87,81	Rp 24.594.119,00	12,19

			Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 93.881.400	Rp 93.881.400	Rp 79.760.880	84,96	Rp 14.120.520,00	15,04
5	PROGAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1.687.489.942	Rp 1.687.489.942	Rp 467.007.300	27,67	Rp1.220.482.642,00	72,33
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 74.919.538	Rp 174.917.573	Rp 154.665.800	88,42	Rp 20.251.773,00	11,58
6	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 47.349.426	Rp 47.349.426	Rp 45.467.000	96,02	Rp 1.882.426,00	3,98
				Rp13.013.305.352	13.217.317.089	Rp 9.655.124.868	73,05	Rp3.562.192.221,00	26,95

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No IKK	Data yang diperlukan	Capaian	Keterangan Sumber Data
40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4083	Dinsos
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	5500	Dinsos
41	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	23425	Dinsos
	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	15000	Dinsos

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	slrt	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dinsos	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinsos	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	4199	Dinsos	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinsos	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinsos	
		7	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinsos	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinsos	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	116	Dinsos	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2	Dinsos	

		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	5	Dinsos	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	1	Dinsos	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos	
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	Dinsos	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	20	Dinsos	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	23.629	Dinsos	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	Dinsos	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	12	Dinsos	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan	4277	Dinsos	

		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	35	Dinsos	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	43	Dinsos	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	5.944	Dinsos	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	5	Dinsos	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	.3	Dinsos	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	Dinsos	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	23.425	Dinsos	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28	Dinsos	

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.3**Indikator Kinerja Utama (IKU)****Pencapaian indikator Persentase PPKS tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	99,93	50	199,86
2	Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan sosial kesejahteraan sosial	%	89,71	85	105,54
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	73,26	80(A)	91,58

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Angka PPKS pada tahun 2023 cenderung masih sangat tinggi, hal ini dikarenakan masih tingginya Fakir Miskin dan Korban Bencana Alam di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Sosial telah berupaya melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial sehingga angka PPKS berkurang.

Dengan demikian maka, persentase PPKS yang mendapat pelayanan Kesejahteraan Sosial sebesar 99,93 % dari target 50%. Dan persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 89,71% dari target 85%.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Data PPKS
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	58
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	23
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	37
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23
8	Lanjut Usia Terlantar	3.636
9	Penyandang Disabilitas	661
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	11
12	Pengemis	4
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	-
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	36
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	33
18	Korban Traffiking	-

19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	23.283
22	Korban Bencana Sosial	142
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	9
24	Fakir Miskin (FM)	97.932
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	125.970

Di Kabupaten Tanah Laut tidak semua jenis PPKS tersebut dapat terlayani, hanya 15 jenis PPKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Berikut jumlah PPKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023 :

Tabel 2.5.
Rekapitulasi PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	58
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	23
4	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	37

5	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23
6	Lanjut Usia Terlantar	3.636
7	Penyandang Disabilitas	661
8	Gelandangan	11
9	Pengemis	4
10	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	36
11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	33
12	Korban Bencana Alam	23.283
13	Korban Bencana Sosial	142
14	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	9
15	Fakir Miskin (FM)	97.932
	TOTAL	125.890

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 125.890 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 15 jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 15 jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Fakir Miskin yaitu sebesar 97.932 jiwa atau sekitar 77,80 % dan penanganan korban bencana alam yaitu sebanyak 23.283 jiwa atau sekitar 18,50 %. Program penanganan fakir miskin ini lebih banyak diarahkan pada program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK APBD maupun APBN.

Adapun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	NAMA PSKS	YANG ADA	YANG AKTIF
1	PSM	50	25
2	TKSK	11	11
3	Karang Taruna	135	130
4	Puskesmas	47	47
5	Penyuluh Sosial Masyarakat	29	24
6	TAGANA	28	28
7	pendamping PKH	36	36
8	Pendamping Rehabilitasi Sosial	4	4
Jumlah		340	305

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang terdaftar dan bersertifikat sebanyak 8 lembaga atau sekitar 340 orang namun yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial hanya 305 orang atau sekitar 89,71 %.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah yang hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah.

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

(SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).

3.2 Tugas Pembantuan Yang Di Berikan

(SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Sosial

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluarpanti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Tabel 4.1

No	Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 tercantum dalam tabel 4.2 berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi	100%

	luar panti	kebutuhan dasarnya di luar panti	
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	100%

Sedangkan Pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dipergunakan dalam bentuk pelayanan :

- a. Layanan Kedaruratan;
- b. Penyediaan Permakanan;
- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Dan Sosial;
- d. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- e. Penyediaan Makanan
- f. Penyediaan Tempat Pengungsian

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 8 (enam) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut :

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	100 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
	- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5500 Orang	Rp. 4.436.860.000
	- Penyediaan Alat Bantu			Rp. 35.707.986
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	40 Orang	Rp. 53.043.307

		Kewenangan Kabupaten/Kota		
	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	Rp. 110.795.00
	- Pemberian layanan rujukan		2 orang	Rp. 10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	
	- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	100%	
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp. 18.750.000
	- Rujukan anak-anak terlantar		15 orang	Rp. 16.590.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	100%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani	100%	
	- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa	15.000 jiwa	Rp. 1.687.489.942

		Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota			
	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		20 orang	Rp. 174.917.538

4.1.3 REALISASI PENCAPAIAN SPM

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
01.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	606	606	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %

			-1	-2	-3	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	606	606	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	547	547	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	52	52	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	6	6	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00 %
	JUMLAH	1,284	1,284	0	1,300.00 %	
02.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

			Dilayani			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	50	50	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	
						100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	12	12	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	15	15	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	14	14	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	50	50	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	37	37	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	37	37	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	37	37	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100.00 %
	JUMLAH	324	324	0	1,200.00 %	

03.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	122	122	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	122	122	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	122	122	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	25	25	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	122	122	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	20	20	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	10	10	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang	10	10	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	10	10	0	100.00 %

	keluarga					
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00 %
	JUMLAH	491	491	0	1,300.00 %	
04.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	7	7	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	7	7	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2	2	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Orang	2	2	0	100.00 %

	dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan					
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	7	7	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7	7	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	7	7	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100.00 %
	JUMLAH	54	54	0	1,200.00 %	
05.00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15000	23,706	-8,706	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	15000	23,706	-8,706	158.04 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	15000	23,706	-8,706	158.04 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	11	11	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5,500	5,500	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	5,500	5,500	0	100.00 %

6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0%
JUMLAH	41,011	58,423	-17,412	616.08 %	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 8 (enam) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut :

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu	Sumber dana
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	100 %	100 %		APBD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100 %		APBD

	Pengemis di Luar Panti Sosial					
	- Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5500 Orang	4038 orang	Rp. 4.436.860.000	APBD
	- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	2 orang	2 orang	Rp. 35.707.986	APBD
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 orang	Rp. 53.043.307	APBD
	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	250 orang	250 orang	Rp. 110.795.00	APBD

	- Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten kota	2 orang	2 orang	Rp. 10.000.000	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %		APBD
	- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	100%	33,3%		APBD
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	15 orang	Rp. 18.750.000	APBD
	- Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	15 orang	15 orang	Rp. 16.590.000	APBD
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	100%	100%		APBD

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani	100%	100%		APBD
	- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000 jiwa	23.283 jiwa	Rp. 1.687.489.942	APBD
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota					APBD
	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		20 orang	20 orang	Rp. 174.917.538	APBD

4.1.5 Dukungan Personil

Tabel 4.1 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	8 (2 PNS dan 6 Non PNS)
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	6 (2 PNS dan 4 Non PNS)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	20 (3 PNS, 11 TKSK dan 6 PSM)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Tidak ada personil
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	30 (2 PNS, 28 TAGANA)

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di tunjukkan pada tabel berikut:

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

No.	NAMA PSKS	YANG ADA	YANG AKTIF
1	PSM	50	25
2	TKSK	11	11
3	Karang Taruna	135	130
4	Puskesmas	47	47
5	Penyuluh Sosial Masyarakat	29	24
6	TAGANA	28	28
7	pendamping PKH	36	36
8	Pendamping Rehabilitasi Sosial	4	4
Jumlah		340	305

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
4. Kurangnya Pedidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat;
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 antara lain :

- a. Adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2023, termasuk capaian kinerjanya.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Laporan Tahunan SPM Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.